

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman. Teknologi selalu mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berkembang dari waktu ke waktu. Teknologi dapat memberikan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan segala aktivitas dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul pada zaman sekarang. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia (Undang-undang RI No. 18 tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Menurut Pacey (1983) dalam Syahri (2006), kehadiran teknologi agar bisa efektif implementasinya di masyarakat harus didukung oleh tiga elemen yaitu aspek teknis, organisasi dan budaya. Aspek teknis dapat dilihat dari aspek internal yang dimiliki oleh teknologi tersebut, misalnya dari spesifikasi, fitur, perangkat keras maupun lunak, kecocokan, dan inovasi. Pada aspek organisasi, misalnya berupa suatu kebijakan atau *policy* yang mengatur pemanfaatan teknologi pada suatu organisasi. Pemerintahan merupakan salah satu contoh organisasi yang memiliki wewenang dalam menetapkan suatu kebijakan. Dalam hal ini, sebuah

pemerintahan akan melakukan tugasnya sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan pemakaian suatu teknologi yang bisa membawa manfaat pada masyarakatnya. Aspek budaya menekankan pada sisi budaya yang melekat di masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut, misalnya perilaku, nilai-nilai, norma dan etika yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu hasil pengembangan teknologi informasi yang banyak dimanfaatkan oleh organisasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya adalah sistem informasi. Laudon dan Laudon (2005) mendefinisikan sistem informasi sebagai seperangkat komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan (atau mendapatkan kembali), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem informasi akan mempengaruhi bagaimana organisasi membuat keputusan, merencanakan, dan mengatur semua bagian organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi sektor publik.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Pemerintah pusat sebagai salah satu organisasi sektor publik membutuhkan sistem informasi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pusat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 213/ PMK. 05/ Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pada Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan pada kementerian negara/lembaga masing-masing. Kemudian pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).

SAI merupakan salah satu subsistem dari SAPP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 213 /PMK.05 /2013, SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Ketua Lembaga. Setiap Kementerian Negara/ Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (Mahsun, dkk, 2007).

BPKH Wilayah XI Jawa – Madura adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. BPKH Wilayah XI Jawa – Madura mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan

kawasan hutan dan penyajian data informasi sumberdaya hutan (Setyawan, 2015). BPKH Wilayah XI Jawa – Madura sebagai satuan kerja (satker) dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapatkan alokasi anggaran pemerintah berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/ PMK. 05/ Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, satker BPKH Wilayah XI Jawa – Madura dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Penerapan sistem informasi pada pemerintahan pusat akan mempengaruhi kinerja pemerintahan pusat dan kinerja individu dalam pemerintah pusat tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas (Cokroaminoto, 2007). Kinerja individu dapat dilihat dari hasil kerja yang dicapai individu tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman, serta keterampilan yang digunakan oleh individu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pencapaian kinerja juga berkaitan dengan kesesuaian antara sistem informasi yang diterapkan dengan tugas, kebutuhan dan kemampuan individu dalam organisasi tersebut.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Astuti (2008) berjudul tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Kota

Malang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu pada pemerintah kota Malang.

Penelitian kedua dilakukan oleh Anggraini (2011) dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan secara simultan sistem informasi akuntansi dengan karakteristik yang *relevant, reliable, complete, timely, understandable, verifiable* berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Namun secara parsial, karakteristik sistem informasi akuntansi *relevant, reliable, complete* berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sedangkan karakteristik yang *timely, understandable, verifiable* tidak berpengaruh.

Penelitian serupa dilakukan oleh Sitepu (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan terhadap efektivitas kinerja perusahaan yang menguji secara empiris tentang pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan terhadap efektivitas kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penggajian dan pengupahan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja perusahaan.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, hanya penelitian Astuti (2008) yang berkaitan dengan lingkungan pemerintahan sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk menguji kembali penelitian Astuti (2008) dengan objek yang berbeda yaitu BPKH Wilayah XI Jawa – Madura yang berlokasi di Daerah

Istimewa Yogyakarta. Adapun BPKH Wilayah XI Jawa – Madura yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih karena terdapat permasalahan yakni perencanaan anggaran yang belum sesuai dengan rencana strategi (restra) (Wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha BPKH Wilayah XI Jawa-Madura). Selain itu, penelitian yang dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memudahkan peneliti untuk bertemu dengan responden secara langsung agar tidak salah sasaran. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa – Madura”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Apakah terdapat pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi pada kinerja individu pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa - Madura?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2008) dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa – Madura.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian serupa. Oleh karena belum banyaknya penelitian yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi dilingkungan pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu.

### **2. Kontribusi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa Madura, dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja pada tingkat Unit Pelaksana Teknis yang baik melalui penerapan sistem informasi akuntansi.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Bab kedua ini berisikan teori-teori yang melandasi penelitian ini dan hipotesis penelitian.

### Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan penjelasan mengenai metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

### Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

### Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti berikutnya.